

DESA

2026

PERDA KAB. NGANJUK NO.6, LD 2026/NO.3, 86 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG DESA

- ABSTRAK : - Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nilai sosial budaya, musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial, perlu didukung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Telah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.
- Dasar hukum peraturan ini adalah Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nilai sosial budaya, musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Pengaturan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk agar berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Subjek yang diatur adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat Desa. Kewajiban utama meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penyelenggaraan musyawarah desa. Sanksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- Penjelasan: 15 hlm.
- Lampiran: 7 hlm.